
SETIATI SURASTO DALAM PERJUANGAN BURUH PEREMPUAN PADA 1940AN-1960AN

SETIATI SURASTO IN THE WOMEN LABOUR'S STRUGGLE DURING 1940S-1960S

Ayu Wulandari

Magister Sejarah, Universitas Gadjah Mada
Jln. Sosio Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia
ayuwulandari99@mail.ugm.ac.id

Diterima tanggal 25 Desember 2022

Disetujui tanggal 12 Desember 2023

ABSTRACT

This research discusses the views and roles of Setiati Surasto in improving the fate of women labour between the 1940s and 1960s. This study stems from companies' or employers' discrimination that always considers female labour as cheap labour from time to time. Women labour were seen as unskilled workers, feasibly exploited and not appreciated. Consequently, women labour experiences discrimination in various forms, ranging from wages to violations of their rights. This study used historical research methods in which newspapers and magazines were primary sources. The findings indicate that the inequality that they experience generates women's agency and activism. Setiati Surasto was one of the activists who voiced her views on equality and welfare for women labour through writing and direct action. This research has filled the gaps in Indonesian historiography, especially by presenting the biography of a women's labour activist during the early period of Indonesian independence.

Keywords: *women labour, discrimination, equality, roles, and Setiati Surasto.*

ABSTRAK

Kajian ini membahas pandangan dan peran Setiati Surasto terhadap perbaikan nasib buruh perempuan pada tahun 1940an sampai 1960an. Kajian ini bermula dari diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan atau majikan terhadap buruh perempuan karena mereka selalu dianggap sebagai tenaga kerja murah dari masa ke masa. Buruh perempuan dianggap sebagai tenaga kerja yang tidak terampil sehingga dinilai layak untuk dieksploitasi tenaganya. Hal ini mengakibatkan diskriminasi dalam berbagai bentuk mulai dari diskriminasi dalam pemberian upah sampai pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Kajian ini dikerjakan dengan metode penelitian sejarah dengan menggunakan sumber primer berupa surat kabar dan majalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan kondisi yang dihadapi buruh perempuan melahirkan agensi dan aktivisme perempuan. Termasuk diantaranya adalah

Setiati Surasto yang menyuarakan pandangannya mengenai kesetaraan dan kesejahteraan bagi buruh perempuan melalui tulisan hingga aksi secara langsung di lapangan. Kajian ini juga mengisi kekosongan dalam historiografi Indonesia, terutama dengan menghadirkan biografi aktivis buruh perempuan pada periode awal kemerdekaan Indonesia.

Kata kunci: buruh perempuan, diskriminasi, peran, kesetaraan, dan Setiati Surasto.

A. PENDAHULUAN

Perempuan telah lama menjadi bagian dari kegiatan ekonomi dalam sejarah peradaban manusia. Pada periode modern awal di Asia Tenggara misalnya, kaum perempuan telah ikut ambil bagian dalam berbagai aktivitas perekonomian. Andaya (2021:154) dengan merujuk pada catatan Padtbrugge misalnya menuliskan bahwa perempuan Bajo terlibat dalam upaya pembuatan dan perdagangan tembikar dengan teknik *tatap* dan *pelandas*. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam perekonomian, termasuk industri tembikar, tidak dapat diabaikan. Kemudian dalam berbagai kelompok lainnya, perempuan terlibat aktif dalam ekonomi pertanian hingga perdagangan berbagai macam komoditas.

Perempuan dalam masyarakat kelas menengah ke bawah, juga menjadi pelaku ekonomi. Banyak perempuan yang bekerja sebagai buruh turut serta dalam barisan buruh bersama dengan laki-laki. Buruh merupakan kategori sosial yang penting terutama dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Selain sebagai kelompok yang menjamin keberlangsungan industri dengan tenaganya, buruh juga memiliki peran dalam berbagai bidang lainnya. Saptari (2013:11) misalnya memandang buruh sebagai kategori penting dalam upaya mendobrak kolonialisme untuk

menuju sebuah bangsa yang baru. Artinya, buruh dalam berbagai episode sejarah Indonesia menjadi pelaku perjuangan menuju kemerdekaan. Dalam beberapa hal, retorika tentang buruh juga menjadi rujukan bagi tokoh-tokoh pergerakan untuk berbicara tentang penindasan, kemelaratan, dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial.

Sayangnya, sebagai bagian dari kelompok menengah ke bawah, kesejahteraan kaum buruh sering kali terabaikan. Hak-hak mereka sering kali tidak dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang mempekerjakannya, baik perusahaan asing maupun nasional. Termasuk buruh perempuan yang sering kali mengalami peminggiran, diskriminasi, dan marginalisasi. Locher-Scholten (2000:50) misalnya, menyebutkan bahwa selama masa kolonial Hindia Belanda, buruh perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah. Anggapan ini kerap muncul, baik dari kalangan Eropa maupun kalangan para pemimpin lokal.

Karenanya, tidak mengherankan jika kemudian buruh perempuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi seperti pemberian upah yang rendah dan jam kerja yang tidak sesuai. Sebagai contoh, diskriminasi ini terjadi pada buruh perkebunan karet di Sumatra Timur sepanjang 1900 sampai 1940an. Di mana perempuan mendapat-

kan upah yang rendah, makanan yang tidak layak, hingga perumahan yang tidak memenuhi standar kesehatan sehingga banyak di antara mereka yang menderita penyakit disentri hingga malaria (Lukitaningsih dan Padmo 2004:42-43). Padahal, di Hindia Belanda terdapat cukup banyak perempuan yang bekerja sebagai buruh, terutama di perkebunan-perkebunan baik milik pemerintah maupun swasta. Knight (2000:107) memperlihatkan bahwa pada awal abad ke-20 perempuan dipekerjakan dan dibayar dengan upah yang sangat rendah dalam proses penyiangan (sering disebut wanita penyang) di perkebunan tebu.

Memasuki masa pendudukan Jepang, posisi buruh perempuan menjadi semakin penting. Hal ini diakibatkan oleh adanya kebijakan di mana laki-laki harus bekerja sebagai romusha, sehingga para perempuan mau tidak mau harus bekerja sebagai buruh, bahkan menjadi tulang punggung keluarga (Stuers 2017:235). Dengan demikian, buruh perempuan juga penting dalam konteks keberlangsungan hidup keluarga pada masa pendudukan Jepang. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah buruh perempuan di berbagai sektor. Di Bali misalnya, pada masa pendudukan Jepang terjadi peningkatan jumlah buruh perempuan yang bekerja untuk memperbaiki fasilitas umum seperti jalan hingga bekerja di pabrik (Nurliana 1986:39). Bahkan, hal ini seperti menjadi pemandangan biasa.

Sayangnya, peningkatan jumlah buruh perempuan tidak diikuti dengan kebijakan yang menguntungkan mereka. Bagaimanapun, posisi mereka

dalam berbagai industri dan lapangan kerja tetap menjadi “kelas kedua” yang dianggap lebih rendah dari buruh laki-laki, baik dari sisi upah, kemampuan bekerja, cara berpikir, dan sebagainya. Namun, buruh perempuan tidak mampu melakukan protes apapun demi tetap bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Kondisi demikian pun tidak serta merta berubah setelah Indonesia Merdeka. Proklamasi kemerdekaan pada 1945 tidak memberikan jaminan kesejahteraan dan kesetaraan bagi buruh perempuan. Pada periode awal kemerdekaan, mereka bahkan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang pasti di Indonesia (Suryomenggolo 2015:70).

Kondisi di atas mendorong tokoh-tokoh dari berbagai organisasi turun tangan untuk mengupayakan perbaikan terhadap kesejahteraan buruh perempuan, salah satunya adalah Setiati Surasto. Ia adalah tokoh yang cukup aktif menguraikan pandangannya mengenai buruh perempuan, baik melalui tulisan-tulisannya ataupun melalui aksinya secara langsung di lapangan. Dalam pandangannya, terdapat diskriminasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau majikan terhadap para buruh perempuan. Ia juga bersikap antipati terhadap kapitalisme yang mengakar di perusahaan-perusahaan yang sering kali memperkuat diskriminasi tersebut.

Bagaimanapun, dunia kerja pada abad ke-20 memang masih menganut pembedaan berbasis gender. Sebagaimana diungkap oleh Bock (1989:20), perempuan pekerja rata-rata diperlakukan secara berbeda di berbagai

lapangan pekerjaan. Misalnya, mereka mendapatkan upah yang lebih kecil dibanding para pekerja laki-laki. Karenanya, Setiati menggandeng buruh perempuan untuk menentang diskriminasi tersebut. Kaum buruh yang ia maksud adalah perempuan-perempuan Indonesia yang bekerja pada perorangan atau perusahaan, terutama berasal dari kalangan kelas bawah.

Sayangnya, nama Setiati Surasto hampir tidak pernah disinggung dalam narasi besar historiografi Indonesia. Nadia (2006:7-8), sejarawan sekaligus aktivis perempuan sempat menyuarakan kegelisahannya mengenai ketidakhadiran tokoh-tokoh perempuan termasuk diantaranya adalah Setiati Surasto, yang ia sebut sebagai perempuan pertama yang memimpin surat kabar Buruh dalam historiografi Indonesia. Sejauh ini, nama Setiati Surasto lebih sering disebut dalam narasi besar sejarah gerakan perempuan Indonesia. Martyn (2001) misalnya menyebutkan peran Setiati Surasto dalam aktivitas kewarga-negaraan pada tahun 1950an, khusus-nya dalam upaya mengajak para perempuan untuk bergabung dengan organisasi politik. Sementara Wieringa (2010) dalam kajiannya mengenai penghancuran dan demoralisasi gerakan perempuan, sempat menyebut nama Setiati Surasto ketika membicarakan pertautan Gerwani dengan SOBSI. Namun demikian, tampak belum ada upaya untuk menjelaskan kiprah Setiati Surasto secara khusus dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia.

Hal yang sama juga tampak dalam sejarah gerakan buruh atau sejarah ekonomi Indonesia, di mana nama

Setiati Surasto masih sangat termarginalkan. Suryomenggolo (2015) dalam kajiannya yang berjudul *Politik Perburuhan Era Demokrasi Liberal 1950an* misalnya, tidak menyinggung peran besar Setiati Surasto saat membahas tentang perkembangan perlindungan hukum bagi buruh perempuan. Ketiadaan narasi mengenai Setiati Surasto diduga sebagai akibat dari peminggiran terhadap gerakan buruh perempuan dalam historiografi yang dipengaruhi oleh Orde Baru. Di bawah pengaruh rezim Orde Baru, gerakan buruh dan segala gagasan yang dibangun di dalamnya dianggap sebagai bagian dari ideologi kiri (Hera 2015:19). Jika gerakan buruh secara umum tidak dihadirkan dalam historiografi, maka tidak heran jika tokoh-tokoh gerakan buruh, termasuk tokoh perempuan, juga tidak pernah disinggung.

Oleh karena keterbatasan narasi mengenai Setiati Surasto dalam historiografi Indonesia, maka kajian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut. Kajian ini mendiskusikan peran dan gagasan Setiati Surasto dalam upaya memperbaiki nasib buruh perempuan sepanjang 1940an sampai 1960an. Ada dua aspek utama yang menjadi fokus dalam kajian ini, yakni *pertama* mengenai latar belakang Setiati Surasto dan persentuhannya dengan berbagai organisasi yang berorientasi pada kelas buruh. *Kedua*, adalah mengenai peran sekaligus pandangan Setiati Surasto mengenai kesejahteraan buruh perempuan. Namun, agar kajian ini tidak terlepas dari jiwa zamannya, maka kondisi perburuhan pada 1940an-1960an juga

akan menjadi bagian dari narasi pembahasan hasil penelitian. Terakhir, kajian ini fokus di periode 1940an sampai 1960an dengan ruang lingkup Indonesia, waktu dan tempat di mana Setiati Surasto aktif memperjuangkan nasib buruh perempuan.

B. METODE

Kajian ini dikerjakan dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang secara umum terdiri atas pemilihan topik, heuristik, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo 2013:69). Topik yang dipilih adalah peran Setiati Surasto dalam memperjuangkan perbaikan nasib buruh perempuan sepanjang 1940an sampai 1960an. Proses heuristik dalam mengerjakan kajian ini dilakukan di berbagai tempat dan perpustakaan, seperti Perpustakaan Departemen Sejarah UGM, Perpustakaan FIB UGM, dan Perpustakaan Pusat UGM. Kajian ini juga menggunakan surat kabar dan majalah sezaman sebagai sumber primer melalui Perpustakaan Nasional RI.

Kemudian, proses penelitian dilanjutkan dengan verifikasi dengan cara membandingkan isi satu sumber dengan sumber lainnya agar dapat memperoleh fakta sejarah yang dapat dipercaya. Sebagai contoh, dalam proses penelitian pada awalnya terdapat kerancuan informasi mengenai apakah Setiati Surasto resmi tergabung dalam PKI atau tidak. Untuk memastikan hal tersebut, maka penulis melakukan penelusuran dan perbandingan melalui berbagai surat kabar dan majalah sehingga didapatkan fakta bahwa Setiati Surasto adalah anggota PKI. Proses

selanjutnya adalah penafsiran atau interpretasi dan diakhiri dengan proses penulisan atau historiografi.

Kajian ini ditulis dalam bentuk biografi analitis (*analytical biography*). Pendekatan ini dilakukan dengan melihat tiga aspek utama, *pertama*, ungkapan perwatakan tokoh, tindakan-tindakan tokoh, serta konteks atau kondisi zaman terkait tokoh tersebut (Leirissa 1984:94). Selain itu, penelitian ini juga dikerjakan dengan menggunakan pendekatan gender. Dalam kajian ini, pendekatan gender berguna untuk menempatkan Setiati Surasto dalam agensi dan aktivisme perempuan dalam gerakan buruh. *Kedua*, pendekatan gender berguna untuk memposisikan dan menganalisis relasi antara gender dengan kerja, kelas, dan kehidupan ekonomi.

Ketiga, kajian ini menggunakan terminologi “perempuan”, bukan “wanita”, dengan anggapan bahwa terminologi “perempuan” lebih tepat digunakan untuk menjelaskan sosok Setiati Surasto maupun buruh yang telah melintas batas-batas patriarki. Mengacu pada pendapat Rahayu (2017:11), terminologi “wanita” lebih erat kaitannya dengan posisi perempuan sebagai *konco wingking* atau pendamping suami dalam urusan-urusan rumah tangga, sehingga dalam kajian ini terminologi “perempuan” lebih layak digunakan.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Persentuhan Setiati Surasto dengan Organisasi Politik hingga Gerakan Buruh

Setiati Surasto dikenal oleh banyak kalangan terutama oleh aktivis orga-

nisasi dan partai kiri sebagai aktivis buruh perempuan. Setiati Surasto merupakan tokoh kelahiran Banyuwangi, pada 23 Februari 1920.¹ Ia dibesarkan sebagai perempuan muslim, di bawah kultur keluarganya yang menganut agama Islam secara kuat. Hanya saja, di dalam garis perjuangannya, baik di bidang sosial maupun politik, Setiati Surasto memilih untuk beraliansi dengan organisasi-organisasi sekuler. Pada masa kolonial, Setiati Surasto bergabung dengan sejumlah organisasi pergerakan yang revolusioner seperti Indonesia Muda (Anonim 1955d). Melalui organisasi tersebut, Setiati Surasto kemudian berjejaring dengan para pemuda yang menghendaki kemerdekaan bagi Indonesia. Kemudian setelah kemerdekaan, Setiati Surasto bersama sejumlah tokoh seperti Iwa Kusumasumantri, R. Lukman Hakim, Osa Malikil, hingga Sarmidi Mangunsarkoro membentuk Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) sebagai organisasi sekaligus partai politik baru (Anderson 2006:226-227).²

Dalam perkembangannya, Setiati Surasto menyerap dan menerima ide-ide dari golongan kiri. Sebenarnya, tidak ada informasi yang pasti mengenai siapa tokoh yang memengaruhi Setiati Surasto hingga ia tertarik dengan ideologi kiri. Kemudian

pascakemerdekaan, namanya berjejer diantara tokoh-tokoh penting PKI. Ia tergabung dalam Partai Komunis Indonesia (PKI) bersama sejumlah perempuan progresif seperti Salawati Daud, Umi Sardjono, dan tokoh-tokoh perempuan lainnya. Ia juga cukup dekat secara profesional dengan tokoh-tokoh sentral PKI seperti D.N. Aidit, dan Njoto. Ia beberapa kali bersama dengan Aidit, Njoto, dan para petinggi PKI untuk berbincang mengenai *Harian Rakjat* yang merupakan pers milik PKI. Beberapa kali ia juga terlibat dalam proses promosi surat kabar tersebut bersama dengan D.N. Aidit dan petinggi-petinggi lainnya dari PKI.

Selanjutnya, boleh dikatakan bahwa Setiati menjadi pemain aktif dalam perpolitikan nasional. Pada pemilihan umum tahun 1955 misalnya, namanya masuk ke dalam daftar anggota PKI yang masuk ke dalam jajaran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Lestariningsih 2015:53). Masuk ke dalam jajaran anggota MPR membuat namanya dikenal oleh banyak orang dari berbagai partai dan organisasi lainnya. Karirnya dalam PKI terus melejit hingga ia dikirim oleh PKI ke Albania bersama dengan Sophian Waluyo, Anwar Dharma, dan beberapa tokoh lainnya (Hill 2020:352). Ia berangkat ke Albania tepatnya pada tahun 1960. Perjalanannya ke Albania pada dasarnya tidak diperuntukkan mengikuti konferensi atau acara tertentu, melainkan untuk menjadi perwakilan PKI di sana. Pada 1960an, PKI memang tengah memperkuat hubungannya dengan partai-partai komunis di seluruh dunia, termasuk Albania (Mortimer

¹ http://www.konstituante.net/id/profile/PKI_nj_setiati_surasto, diakses pada 29 April 2023.

² Sayangnya, hingga hari ini tidak ditemukan informasi yang cukup memadai mengenai latar belakang keluarga Setiati Surasto meskipun telah dilakukan penelusuran ke berbagai sumber dan referensi.

2006:339-340). Pengalamannya diutus ke Albania tidak sekadar menambah keterampilannya dalam berpolitik atau berjejaring dengan tokoh-tokoh komunis yang tergabung dalam *Albanian Workers Party* (Partai Buruh Albania). Lebih dari itu, Setiati terpapar begitu banyak gambaran mengenai “kehidupan ideal” buruh perempuan dari kehidupan sosial dan perekonomian yang dilihat di Albania.

Di sisi lain, Setiati Surasto juga terpapar ide-ide feminisme atau kesetaraan perempuan dalam berbagai bidang melalui organisasi perempuan yang ia ikuti, yakni Gerakan Wanita Istri Sedar (Gerwis). Gerwis sebenarnya bukan organisasi yang berada di bawah naungan PKI.³ Organisasi ini didirikan pada 4 Juni 1950 oleh S. K. Trimurti sebagai hasil fusi dari beberapa organisasi perempuan seperti Rukun Puteri Indonesia Semarang dan Wanita Madura (Amini 2021:78). Organisasi ini pada dasarnya bergerak di bidang sosial dan politik (Amini 2021:78).

Sama halnya pada saat ia berada di PKI, Setiati Surasto juga mampu memegang peran sentral dalam tubuh Gerwis meskipun posisinya hanya sebagai anggota. Hal ini terbukti dari keterlibatannya dalam berbagai kegiatan yang diinisiasi ataupun diikuti oleh Gerwis. Ia pernah beberapa kali mengikuti lawatan Gerwis ke luar negeri. Pada tahun 1953 misalnya, Setiati Surasto bersama dengan S.K.

Trimurti dan beberapa anggota Gerwis terbang ke Kopenhagen, Denmark untuk mengikuti Kongres Perempuan Sedunia (Anonim 1953c:2). Meskipun sebenarnya, selain hadir sebagai perwakilan Gerwis, Setiati Surasto juga hadir sebagai perwakilan dari Sarbupri (Anonim 1953d).

Persentuhan Setiati Surasto dengan ide-ide kesejahteraan dan kesetaraan buruh dalam ajaran komunisme sebagaimana yang ia peroleh dari PKI mendorongnya untuk memiliki kepekaan sosial terhadap nasib kaum buruh. Tercatat, ia sempat tergabung dalam beberapa organisasi yang memperjuangkan nasib buruh. Pada 1953, namanya tercatat sebagai Sekretaris Sosial/Ekonomi pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) (Anonim 1953c:1). Sosoknya juga sempat tercatat sebagai anggota Dewan Nasional Sarekat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Di dalam organisasi-organisasi inilah, Setiati Surasto makin dekat dengan kalangan buruh dari berbagai lapangan kerja, mulai dari perkebunan hingga industri. Buktinya, Setiati Surasto sering turun ke lapangan hanya untuk mendengarkan permasalahan, diskriminasi, dan dilema yang dihadapi buruh perempuan (Surasto 1960). Melalui cara seperti itu, maka ia bisa membangun kedekatan emosional dengan kaum buruh perempuan. Adapun beberapa keluhan yang ia terima antara lain upah yang tidak sesuai dengan harga kebutuhan pokok dan sistem kerja yang tidak ramah untuk ibu hamil atau menyusui.

³ Bahkan ketika Gerwis bertransformasi menjadi Gerwani, organisasi ini sebenarnya tidak pernah menjadi bagian resmi dari PKI. Hanya saja, banyak dari anggota Gerwis (kemudian menjadi Gerwani) juga merupakan anggota PKI.

Setiati Surasto mengkaitkelindakan ide-ide komunisme yang mengangkat derajat buruh dengan ide feminisme yang memperhatikan kelompok perempuan sebagaimana yang ia peroleh dari Gerwis (yang kemudian berganti nama menjadi Gerwani).⁴ Hal ini membuat ia menyadari bahwa di antara kaum proletar, terdapat buruh perempuan yang nasibnya masih sering kali terabaikan. Akhirnya, ia memutuskan untuk menaruh perhatiannya pada para buruh perempuan.

Terbukti dari beberapa kegiatan yang ia ikuti, menunjukkan dedikasinya pada kelompok buruh perempuan. Pada Mei 1956 misalnya, Setiati Surasto menuju ke Budapest untuk memimpin delegasi buruh ke Kongres Buruh Perempuan Sedunia yang dilaksanakan pada 14 sampai 17 Juni 1956 (Anonim 1956:1). Pengalaman ini membuat Setiati terkoneksi dengan para aktivis yang memperjuangkan nasib buruh perempuan di negaranya masing-masing. Setiati dan anggota delegasi lainnya memiliki kesempatan untuk bertukar cerita mengenai sistem kerja yang diberlakukan oleh setiap negara untuk kaum buruh perempuan, seperti di Hungaria, Prancis, hingga Uni Soviet (Kumpul 1956b:567).

⁴ Gerwis berubah menjadi Gerwani pada tahun 1954 dan bertransformasi menjadi sebuah organisasi yang lebih besar. Jumlah anggotanya pada saat itu bahkan ditaksir mencapai sekitar 80.000 perempuan. Lihat Mutiah Amini, *Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia 1928-1998*, (Yogyakarta: UGM Press, 2021), hlm. 78-80.

Selama memimpin delegasi buruh ke Budapest, Setiati Surasto bersama anggota delegasi lainnya juga menyempatkan diri ke Uni Soviet. Mereka bertandang ke Kota Moskow. Ia tidak hanya beramah tamah dengan kaum perempuan di sana, tetapi juga melihat langsung bagaimana buruh perempuan bekerja ataupun aturan seperti apa yang diterapkan. Setiati dan para anggota delegasi Indonesia mempelajari sistem cuti di mana buruh perempuan yang telah bekerja lebih dari tiga tahun mendapatkan hak untuk cuti selama tiga bulan dengan tetap mendapatkan gaji, mempelajari fasilitas yang diperoleh buruh perempuan seperti tempat penitipan anak, hingga peraturan di mana selama jam kerja berlangsung maka buruh perempuan diberikan waktu luang selama satu jam untuk memberikan ASI kepada anaknya (Kumpul 1956b:566-569).

Melalui pengalaman kunjungannya ini, Setiati Surasto dan para delegasi memiliki gambaran mengenai bagaimana seharusnya buruh perempuan diperlakukan di Indonesia (Kumpul 1956a:498). Di negara-negara sosialis dan komunis, perempuan bisa bekerja di berbagai lapangan pekerjaan dengan jabatan mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi, seperti menjadi penjual makanan, bekerja di pabrik, hingga ada yang memegang jabatan sebagai kepala bagian di institusi tertentu. Sekilas, mereka melihat bahwa para buruh perempuan tersebut tidak diperlakukan berbeda oleh negara ataupun perusahaan. Hal ini dicatat oleh Nyonya Kumpul yang juga ikut

dalam lawatan tersebut, di mana ia menyatakan "... tampaklah dengan jelas, bahwa diskriminasi djabatn bagi wanita itu tidak ada. Djadi kaum wanita di Moskow dan sekitarnja telah dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kaum pria" (Kumpul 1956a:498).

Selain itu, buruh perempuan juga mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya melalui pelatihan, sehingga kemampuan mereka dianggap sama dengan buruh laki-laki. Meskipun terkesan subjektif, namun faktanya gambaran seperti itulah yang diperoleh Setiati dan anggota delegasi lainnya ketika bertandang ke Moskow. Hal ini membuat Setiati dan rekan sejawatnya berimajinasi bahwa kehidupan kelas pekerja seperti itulah yang dituntut dan diterapkan di Indonesia.



Gambar 1. Setiati Surasto bersama rombongan dalam lawatan ke Uni Soviet tahun 1956. Sumber: Kumpul 1956a:497.

Setiati Surasto terus aktif dalam organisasi nasional maupun internasional, mulai dari PKI hingga Gabungan Serikat Buruh Sedunia (World Federation of Trade Unions atau WFTU). Dari sisi politik misalnya, ia dengan gencar memengaruhi buruh perempuan untuk bergabung ke dalam partai khususnya PKI. Hal ini di-

cerminkan dalam tulisannya yang berjudul *Memperluas Keanggotaan Partai di Kalangan Wanita* yang diterbitkan pada 1957. Menurutnya, PKI dapat menjadi media bagi kaum perempuan (termasuk buruh) untuk melakukan akselerasi menuju kemajuan. Hal ini sebagaimana yang ia tuliskan, "PKI tidak membedakan antara wanita dan laki2, djuga dalam keanggotaannya. Apa sebabnja maka Partai mengadakan konperensi2, pertemuan2, grup2, bahkan kursus2 khusus bagi anggota dan aktivis wanita? Hal ini dilakukan untuk mendekatkan kemadjuan daripada anggota-anggota wanita..." (Surasto 1957:19). Karenanya, ia memandang bahwa perempuan sebaiknya bergabung dengan partai.

Sementara itu melalui SOBSI, Setiati Surasto terkoneksi dengan aktivis buruh kiri dari berbagai negara yang secara khusus tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Sedunia (World Federation of Trade Unions atau WFTU). Pada 1964, ia diangkat menjadi Sekretaris WFTU yang saat itu berpusat di Praha. Menurut Hearman (2016:32), beberapa tokoh dari Indonesia juga menjadi petinggi WFTU dan sesekali memimpin delegasi WFTU ke luar negeri meskipun sayangnya tidak disebutkan nama dari tokoh-tokoh yang dimaksud. Jabatan di WFTU membuatnya semakin gencar memperjuangkan perbaikan nasib buruh perempuan Indonesia. Ia mengupayakan hal ini melalui sejumlah advokasi, gerakan protes, hingga melalui tulisan-tulisannya.

2. Menyuarakan Kesejahteraan hingga Kesetaraan bagi Buruh Perempuan: Peran Setiati Surasto

Pascaproklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, berbagai upaya dilakukan oleh kaum republiken untuk mempertahankan kemerdekaan. Di sisi lain, mereka juga sibuk melakukan upaya-upaya untuk melepaskan diri dari kekuatan kolonial yang masih tersisa. Salah satunya adalah merebut perusahaan-perusahaan milik Belanda. Dalam hal ini, salah satu golongan yang menorehkan peran adalah kaum buruh. S.K. Trimurti, secara khusus menuliskan bahwa pada masa revolusi kemerdekaan, didirikan *Committe van Actie* yang salah satunya terdiri dari Barisan Buruh Indonesia (BBI) yang memiliki tugas untuk menggerakkan kaum buruh, khususnya dalam upaya merebut perusahaan-perusahaan yang masih dikelola oleh orang Belanda untuk diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. (Trimurti 2020:7-8). Fakta ini menunjukkan bahwa kaum buruh bukan sekadar kelas pekerja, tetapi pada awal kemerdekaan Indonesia mereka justru mendedikasikan dirinya untuk kepentingan negara. Bahkan, buruh perempuan ikut andil dalam upaya ini melalui pembentukan Barisan Buruh Wanita.

Ikut sertanya buruh perempuan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan bukan semata-mata merepresentasikan kepedulian kaum buruh kepada kondisi negara. Lebih dari itu, upaya yang demikian dapat dilihat sebagai ekspresi politik dan aktivitas kewarganegaraan mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh

Becker (2017), aktivitas politik dan kewarganegaraan perempuan tidak melulu terjadi di puncak kekuasaan secara resmi. Sebaliknya, aktivitas perempuan di luar pemerintahan juga bisa dilihat sebagai aktivitas politik mereka. Negara mengganjar kepedulian kaum buruh pada upaya mempertahankan kemerdekaan ini dengan mengesahkan Undang-Undang Ketjelakaan No. 33 Tahun 1947, yang mengatur jaminan bagi buruh yang mengalami kecelakaan kerja (Anonim 1952:3). Undang-Undang ini dikeluarkan sebagai akibat dari banyaknya mesin dan alat produksi perusahaan yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh peperangan pada masa revolusi. Tak lama kemudian, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1947 yang secara khusus mengatur buruh yang mengalami kecelakaan akibat perang. Peraturan terbaru ini dikeluarkan salah satunya sebagai respons pemerintah terhadap Agresi Militer Belanda I yang menimbulkan banyak kerusakan dan kekacauan.

Melihat buruh perempuan yang aktif dalam berbagai agenda selama revolusi kemerdekaan, Setiati Surasto turut berbangga. Ia melihat bahwa kemerdekaan juga membawa dampak bagi peningkatan jumlah perempuan pekerja. Bukan hanya buruh di pabrik-pabrik, menurutnya jumlah perempuan pekerja juga meningkat di berbagai lini seperti di perkantoran, toko-toko, dan sebagainya (Surasto dikutip oleh Martyn 2001:134). Kaum perempuan kini menjadi bagian yang penting dari kelas pekerja di Indonesia, sebagaimana dituturkan oleh Setiati Surasto (Surasto

dikutip oleh Martyn 2001:134). Terutama pada masa-masa perang revolusi, buruh perempuan terkadang menjadi tumpuan bagi perekonomian keluarga karena kaum laki-laki dilibatkan dalam berbagai pergerakan. Sayangnya, nasib buruh perempuan tak banyak mengalami perubahan. Mereka masih mengalami berbagai diskriminasi seperti tidak mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuannya, memiliki suara yang kecil dalam serikat buruh, dan sebagainya (Suryomenggolo 2015:68-69).

Peminggiran dan ketidakadilan terhadap buruh perempuan menggugah nurani Setiati Surasto. Pada masa revolusi kemerdekaan, Setiati mulai tampil dalam berbagai misi dan aktivitas yang berkaitan dengan nasib buruh perempuan di Indonesia. Kemunculannya yang begitu fenomenal adalah pada perayaan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 1947 di Jakarta (Anonim 1947a). Perayaan ini merupakan acara yang telah dirancang oleh Setiati dan panitia lainnya beberapa waktu sebelumnya. Tercatat pada April 1947, beberapa pers telah meliput persiapan acara peringatan Hari Buruh Internasional. Dalam *Het Dagblad: Uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia* misalnya, dilaporkan mengenai pembentukan panitia yang diketuai oleh Setiati sendiri, yang juga diikuti proses penyusunan rangkaian acara (Anonim 1947b). Persiapan ini dapat dikatakan cukup matang, sehingga acara yang dipimpin Setiati dapat berjalan sesuai harapan. Saat itu, ia telah bergabung ke dalam SOBSI dan dikenal sebagai aktivis perempuan. Dalam perayaan

tersebut, Setiati hadir sebagai ketua panitia yang membuka perayaan sekaligus memiliki kesempatan untuk menggelorakan semangat para buruh perempuan yang hadir.

Setelah itu, Setiati Surasto makin aktif bertemu dengan para buruh perempuan, mendengarkan aspirasi mereka, dan sebisa mungkin mendesak pemerintah dan para pengambil kebijakan untuk melakukan perubahan positif. Terutama mengenai dasar hukum tentang perlindungan dan perlakuan terhadap buruh perempuan, Setiati Surasto menjadi tokoh yang bersuara cukup lantang pasca 1 Mei 1947. Perubahan yang sangat mendasar baru terjadi pada 1948 ketika Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 Tentang Kerdja disahkan, yang secara khusus menyebutkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi para buruh perempuan (Suryomenggolo 2015:69). Undang-undang ini tentu memberikan angin segar bagi para perempuan pekerja, di mana mereka mengharapkan adanya perbaikan upah, kesempatan cuti yang cukup, dan lain-lain. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur tentang pekerja anak-anak yang saat itu masih banyak dipekerjakan di berbagai tempat usaha. Sayangnya, undang-undang tersebut hampir tak pernah diaplikasikan ke dalam aturan-aturan perusahaan. Realisasi yang lebih nyata baru terjadi pada 1951, di mana Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Kerja No. 1 Tahun 1951 yang memuat peraturan tentang perlindungan, hak cuti, dan hak-hak lainnya yang wajib diterima oleh buruh perempuan.

Dedikasi Setiati Surasto terhadap perjuangan kaum buruh perempuan makin terlihat pada 1950an. Tepatnya pada 1951, Setiati Surasto bersama Umi Sardjono memimpin “Panitia Sosial Buruh Wanita” yang dibentuk oleh Menteri Perburuhan saat itu yakni Iskandar Tedjasukmana (Suryomenggolo 2015:64). Pembentukan panitia tersebut sesungguhnya bisa dilihat sebagai wujud perhatian pemerintah pusat terhadap nasib buruh perempuan. Secara khusus, Panitia Sosial Buruh Wanita ini memiliki tugas untuk menyiapkan pembentukan badan-badan atau hal-hal yang diperlukan guna menunjang kesejahteraan buruh perempuan. Misalnya, buruh perempuan yang sudah menikah biasanya akan membutuhkan klinik bersalin, tempat penitipan anak jika mereka sudah melahirkan, serta perangkat-perangkat lainnya yang dianggap penting. Sayangnya, tak ada kejelasan mengenai tentang keberhasilan Panitia Sosial Buruh Wanita melaksanakan tugasnya, namun yang jelas nasib buruh perempuan tak banyak mengalami perubahan. Terlebih pada tahun 1950an, ketidakadilan gender masih menjadi penyakit yang mengakar dalam dunia kerja di Indonesia. Dorongan untuk memperhatikan kesehatan dan kondisi buruh perempuan misalnya, sering kali dianggap sebagai beban ekonomi bagi pengusaha (Suryomenggolo 2015:85). Padahal bagi buruh perempuan, hal ini adalah bagian daripada tanggung jawab kesusilaan yang seharusnya memang dipenuhi oleh majikan atau perusahaan terkait.

Setiati Surasto aktif melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk

melakukan peninjauan sekaligus protes mengenai ketidakadilan terhadap buruh perempuan. Pada 1952-1953, ia memprotes pemerintah mengenai upah lembur di perusahaan-perusahaan di Pantai Timur Sumatra (Anonim 1953a). Terutama kepada para pemilik perkebunan, Setiati Surasto menyampaikan kegelisahannya mengenai ketidakadilan terhadap para buruh perempuan. Mereka pada umumnya bekerja melebihi jam kerja maka harus diberikan upah lembur yang memadai. Baginya, sangat tidak adil jika tenaga perempuan dihargai secara murah oleh para pengusaha. Protes ini makin keras disuarakan oleh Setiati, terlebih pada saat itu dia juga menjabat di DPP Sarbupri.

Ketika terjadi kenaikan harga, yang dirasakan kaum ibu, Setiati juga turut bersuara. Kemudian ketika perusahaan asing beramai-ramai menanamkan modal di Indonesia, Setiati menyoroti betapa rentannya nasib buruh perempuan di tengah arus industrialisasi tersebut. Terutama sejak 1950an, Pemerintah Indonesia memang menghadapi tantangan yang cukup besar di mana negara ini harus menghadapi perekonomian yang didominasi oleh asing (van Zanden dan Marks 2012:296). Terkait hal ini, Setiati menyatakan bahwa perusahaan asing sering kali melanggar hak asasi manusia. Setiati mendengarkan keluhan dari para buruh perempuan yang upahnya tidak mengalami kenaikan meskipun harga kebutuhan pokok melambung tinggi (Surasto 1960:4).⁵

⁵ Setiati Surasto tidak menyebutkan informasi mengenai nama perusahaan asing yang mendiskriminasi buruh perempuan.

Baginya, hal ini dianggap tidak adil. Menurutnya Pemerintah Indonesia seharusnya memberikan penjaminan lebih terhadap buruh perempuan, termasuk memasukkan hak mogok bagi buruh perempuan ke dalam konstitusi (Anonim 1957b). Sebelumnya, perlu dipahami bahwa hak mogok sempat dilarang untuk dilakukan. Bagi perusahaan, yang oleh Setiati dianggap sebagai kaum kapitalis, pelarangan hak mogok ini tentu menjadi angin segar bagi mereka. Perusahaan atau pemilik usaha bisa terus menguras tenaga para buruh dan membayarnya secara rendah. Padahal dalam pandangan Setiati, keberadaan hak mogok menjadi sangat krusial. Hak mogok ini dianggap sebagai “alat” bagi buruh perempuan untuk menuntut hak-haknya kepada perusahaan. Jika buruh perempuan tidak berani atau tidak diperkenankan melakukan pemogokan, maka kesewenang-wenangan bisa terus dilakukan oleh mereka yang berkuasa di lapangan.

Pada saat yang sama, SOBSI mendukung tindakan dan ide-ide Setiati Surasto. Dukungan ini juga terlihat dari orientasi SOBSI yang mencurahkan perhatiannya terhadap buruh perempuan. Dalam Kongres Nasional SOBSI yang ke dua, organisasi ini menyoroti pentingnya menyokong perjuangan buruh perempuan dalam mendapatkan hak-haknya (Anonim 1955b:3). Kongres ini memperhatikan pemecatan yang sewenang-wenang terhadap buruh perempuan. Perhatian SOBSI meningkat karena jumlah buruh perempuan semakin banyak. Sayangnya tidak ada sumber yang secara pasti menyebutkan berapa jumlah buruh

perempuan sebelumnya, namun peningkatan ini terjadi karena makin besarnya peluang yang diberikan perusahaan atau industri kepada buruh perempuan. Pada Maret 1955, disebutkan bahwa berbagai bidang pekerjaan seperti perusahaan tekstil, rokok, hingga makanan terdapat sekitar 50 persen buruh perempuan. Bahkan di bidang perkebunan, jumlah mereka bisa mencapai 90 persen (Anonim 1955b:3). Jumlah yang terus meningkat ini juga dikemukakan oleh Suryomenggolo (2015).⁶

Namun, mendapat dukungan SOBSI tidak lantas membuat Setiati Surasto merasa cukup dalam bersuara mengenai buruh perempuan. Secara khusus, ia menyoroti buruh perempuan yang menurutnya mengalami penindasan karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan kaum laki-laki (Surasto 1957:19). Terkadang, para pengusaha atau majikan juga sewenang-wenang dalam memberikan hak para pekerjanya. Di Sukabumi pada 1955 misalnya, terjadi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh sebagai protes terhadap majikan yang memberi mereka beras yang dicampur dengan pasir. Diketahui bahwa di antara buruh yang melakukan protes dan mogok kerja tersebut terdapat limapuluh orang buruh perempuan (Anonim 1955a:2).

Namun, protes yang dilakukan oleh buruh tidak selalu mendapatkan respons

⁶ Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua sektor pekerjaan terdapat buruh perempuan dalam jumlah tinggi. Dalam data yang dipaparkan oleh Suryomenggolo (2015:65), jumlah buruh perempuan di sektor pertambangan serta perhubungan dan komunikasi masih di bawah lima persen.

yang baik. Suara perempuan sering kali dianggap tidak penting dan tidak perlu didengarkan. Agar buruh perempuan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengintervensi perusahaan ataupun pemerintah, Setiati Surasto mengajak para buruh perempuan untuk masuk ke dalam organisasi buruh seperti Sarbupri hingga SOBSI. Seruannya pun didukung oleh aktivis lainnya seperti S.K. Trimurti yang menyatakan bahwa buruh perempuan harus mampu memperjuangkan nasibnya sendiri (Trimurti 1950:73). Artinya, ketika terjadi kesewenang-wenangan, maka organisasi buruh khusus perempuan inilah yang bisa menyelamatkan mereka.

Selain itu, Setiati Surasto juga mengajak buruh perempuan untuk bergabung dengan PKI sebagai salah satu solusi untuk memperjuangkan kesetaraan dan hak-hak mereka sebagai kelas pekerja. Sebagaimana yang ia katakan, bahwa baginya PKI merupakan jalan untuk mencapai "... tjita2 massa kaum buruh dan massa kaum wanita; upah jang pantas dan djaminan sosial jang adil bagi kaum buruh" (Anonim 1955c:3). Terlebih pada saat itu, PKI memang menjadi salah satu partai yang mencurahkan perhatiannya terhadap kelas pekerja di Indonesia.

Setiati Surasto telah menyuarakan gagasannya mengenai beberapa hal yang sangat penting terkait buruh perempuan. Sebagai anggota partai yakni PKI, Setiati Surasto tercatat beberapa kali menyuarakan pentingnya perhatian terhadap buruh perempuan melalui forum politik. Dalam sidang pleno Konstituante pada 1957, di mana

ia menyampaikan pidato yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak fundamental bagi buruh (terutama buruh perempuan) dalam perusahaan yang dikelola oleh negara atau orang asing (Anonim 1957a:1). Selama 1950an, Setiati Surasto juga menyuarakan tentang waktu dan masa kerja bagi buruh perempuan. Bahwa karena memiliki peran ganda, sebagai pekerja sekaligus sebagai seorang istri atau ibu, maka buruh perempuan seharusnya mendapat perlakuan khusus dari perusahaan (Anonim 1957a:1). Perlakuan khusus ini tentu saja bukan perlakuan untuk mengistimewakan, melainkan agar haknya sebagai pekerja bisa didapatkan dan selaras dengan tugas dan kewajibannya sebagai ibu atau istri.

Selain itu, Setiati Surasto menyoroti adanya diskriminasi dalam pemberian upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan. Perempuan sering dianggap sebagai *low-cost labour* atau tenaga kerja murah, yang tidak jarang dieksploitasi oleh perusahaan atau majikan yang mempekerjakan mereka. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia. Di Sumatra Utara misalnya, buruh perempuan yang menjadi bagian dari "buruh muda" hanya mendapat penghasilan sebesar 80 persen (Surasto 1960:5). Mereka hanya bisa mendapat upah secara penuh hanya ketika menjadi janda, sementara ketika mereka menikah lagi maka penghasilannya akan kembali menurun. Adapun tunjangan, pada 1960an hanya bisa diberikan kepada buruh perempuan beserta empat orang anaknya dengan jumlah sebesar 75 persen dari upah (Anonim Mei 1960:3). Tentu saja

adanya tunjangan ini menunjukkan perhatian pemerintah dan perusahaan terhadap buruh perempuan, terlebih jika buruh tersebut adalah seorang janda. Namun jika diperhatikan, jumlah tunjangan tersebut tidaklah sebanding dengan yang diberikan kepada buruh laki-laki yang ternyata dibayarkan 100 persen.

Diskriminasi terhadap pemberian upah dan tunjangan bagi buruh perempuan membuat mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Mengacu pada aturan pemberian tunjangan di atas yang hanya diberikan kepada buruh perempuan yang memiliki empat anak misalnya, maka bagaimana jika mereka memiliki lebih dari empat anak? Jikapun mereka memiliki kurang dari empat anak, maka tunjangan dan upah yang diberikan belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Setiati Surasto memandang bahwa diskriminasi dalam pemberian upah dan tunjangan terhadap buruh perempuan membuat mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Para buruh perempuan pada saat itu menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kemiskinan. Meminjam konsep yang digunakan oleh Andaya (2021:139-188), maka kondisi yang demikian tidak lain merupakan feminisasi kemiskinan (*feminization of poverty*).⁷

⁷ Konsep ini merujuk kepada kemiskinan yang berwajah perempuan sebagai akibat dari diskriminasi dan ketimpangan perekonomian antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini digunakan oleh Andaya ketika menjelaskan perempuan yang harus hidup dalam kemiskinan di kota-kota pelabuhan di Asia Tenggara periode modern awal. Lebih lanjut lihat di: Barbara Watson Andaya, *Kuasa*

Perempuan juga makin terdiskriminasi dengan ketentuan untuk naik pangkat atau jabatan. Sepanjang 1940an sampai 1960an, ketidakpercayaan perusahaan terhadap buruh perempuan masih cukup tinggi. Setiati mengatakan bahwa perusahaan masih menganggap pekerjaan para buruh perempuan sebagai sesuatu yang “sepele”, sebagaimana yang ia tuliskan,

“Di-lain2 lapangan kerdja ditetapkan tarif2 jang lebih rendah bagi pekerdjaan2 jang lazimnja dilakukan oleh wanita sepertimemetik teh, buruh batil di perusahaan rokok, buruh membatik, dan sebagainya. Padahal, pekerdjaan tersebut diatas djuga memerlukan ketjakapan2 serta latihan2 jang tertentu” (Surasto 1960:5).

Artinya, buruh perempuan dianggap sebagai *unskilled workers* atau tenaga kerja tidak terampil. Bak melampaui zamannya, Setiati Surasto juga berbicara tentang hak cuti bagi buruh perempuan ketika memasuki masa menstruasi dan melahirkan. Dua isu tersebut tidak lain adalah masalah-masalah yang sering kali diungkap oleh kaum buruh ataupun gerakan feminisme pada era kontemporer. Mengacu kepada Undang-Undang Kerja No. 1 Tahun 1951, Setiati menyebutkan bahwa pemerintah sesungguhnya telah menetapkan cuti khusus menstruasi dan melahirkan bagi perempuan. Pada pasal 13 misalnya,

Rahim: *Reposisi Perempuan Asia Tenggara Periode Modern Awal 1400-1800* (Depok: Komunitas Bambu, 2021), hlm. 139.

disebutkan bahwa perempuan yang memasuki hari pertama dan kedua menstruasi tidak memiliki kewajiban untuk masuk kerja, buruh perempuan diperkenankan untuk cuti selama satu setengah bulan saat akan dan atau setelah melahirkan.

Hanya saja, Setiati menyadari bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang ada tidak menjamin hak-hak buruh perempuan terpenuhi. Perusahaan dan berbagai lembaga yang mempekerjakan perempuan masih sering kali menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada. Setiati Surasto misalnya, menyampaikan keresahannya tentang hak cuti hamil dan melahirkan yang hanya diberikan kepada buruh yang telah bekerja selama minimal satu tahun (Surasto 1960:4-5). Kebijakan cuti yang demikian tentu dianggap tidak adil oleh para buruh perempuan. Bagi mereka, tentu sangat tidak manusiawi jika buruh yang baru bekerja kurang dari satu tahun tidak bisa mendapatkan hak cuti ketika hamil dan melahirkan. Pun, menurut Setiati Surasto, jika buruh perempuan berhasil mendapatkan izin untuk cuti ketika hendak melahirkan, biasanya perusahaan akan “menghukum” buruh tersebut. Setiati mendapati banyaknya buruh perempuan yang justru dipecat dan harus memberikan ganti rugi kepada perusahaan setelah mendapatkan haknya untuk cuti melahirkan. Di samping mengalami kehilangan pekerjaan akibat dipecat, kebijakan seperti itu juga berdampak pada penurunan kesejahteraan para buruh perempuan. Tentu saja, masalah-masalah ini begitu mengganggu Setiati Surasto yang menaruh perhatian besar

pada kesejahteraan buruh perempuan di Indonesia.

Untuk memperkuat upaya perbaikan nasib buruh perempuan, Setiati Surasto kemudian mendirikan Biro Wanita SOBSI pada 1962 (Wieringa 2010:293). Keterikatan biro ini dengan SOBSI di sisi lain menunjukkan bahwa di kalangan kelas pekerja di Indonesia, perempuan dianggap sebagai kategori yang juga penting. Beberapa hal yang disuarakan oleh Setiati melalui biro tersebut antara lain syarat-syarat bagi perempuan saat ingin mendaftar sebagai pekerja, hak terkait kehamilan, persalinan, dan lain-lain. Ia menolak persyaratan yang rumit bagi perempuan yang akan bekerja sebagai buruh. Tentu saja hal ini tidak sebanding dengan bagaimana perlakuan perusahaan terhadap buruh perempuan yang sering kali sangat timpang dengan perlakuan yang diberikan terhadap laki-laki. Sebagai tokoh yang juga dipengaruhi komunisme, ide-ide mengenai “kesetaraan” selalu disuarakannya untuk melawan diskriminasi yang diakibatkan oleh kapitalisme.

Sayangnya, belum usai memperjuangkan buruh perempuan untuk memperoleh haknya secara penuh, perjuangan Setiati Surasto harus terhenti. Sejak peristiwa 30 September 1965 terjadi, mimpinya untuk melihat buruh perempuan Indonesia sejahtera dan lepas dari segala bentuk diskriminasi menjadi sirna. Kiprah dan peran pentingnya bahkan hampir tidak pernah diakui oleh Pemerintah Indonesia pasca huru-hara ini terjadi. Setiati Surasto yang merupakan anggota Gerwani sekaligus PKI harus tersisihkan dalam narasi besar sejarah

Indonesia. Ia bahkan tak memiliki kesempatan untuk kembali pulang ke negaranya. Alih-alih diperbolehkan pulang, ia justru harus hidup sebagai eksil di Swedia.

D. SIMPULAN

Situasi dan kondisi buruk yang dihadapi oleh buruh perempuan Indonesia pada 1940an sampai 1960an telah mendorong tokoh-tokoh perempuan dari berbagai ideologi untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan mereka. Salah satunya adalah Setiati Surasto yang merupakan produk dari pertautan kuat antara pandangan kesetaraan perempuan dan ideologi kiri atau komunisme. Sebagai anggota PKI wajar jika ia kemudian mengharapkan kesejahteraan kaum proletar, termasuk di dalamnya adalah buruh. Pemahamannya tentang gerakan perempuan kemudian menumbuhkan kepekaannya tentang pentingnya aspek gender dalam kelas sosial, sesuatu yang sesungguhnya dilupakan oleh banyak gerakan kiri di dunia. Setiati memiliki kepekaan pada buruh perempuan, baik oleh negara maupun kalangan swasta. Ia bersuara tentang hak-hak buruh perempuan, mulai dari hak yang paling fundamental seperti masalah upah hingga hal-hal yang sangat modernis seperti cuti menstruasi, hamil, dan melahirkan.

Sayangnya, nama Setiati Surasto justru hilang begitu saja dari catatan sejarah Indonesia. Namanya seakan dihapus oleh rezim Orde Baru yang mengesampingkan dan “membuang” tokoh-tokoh kiri yang dinilai sebagai simpatisan Soekarno dan PKI. Namun demikian, kiprah Setiati Surasto tentu tidak bisa dihapus atau ditepis oleh

masyarakat Indonesia, terlebih bagi para kelas pekerja. Di era modern, peran Setiati Surasto justru menjadi begitu relevan untuk dikaji dan dilihat kembali terutama karena masih cukup sering terjadi gerakan-gerakan buruh yang menuntut perbaikan nasib dan pemenuhan hak bagi buruh perempuan. Dengan demikian, rasanya bukan tidak mungkin jika solusi atas masalah-masalah buruh perempuan di hari-hari ini bisa ditemukan dengan melihat apa yang pernah dilakukan dan disuarakan oleh Setiati Surasto lebih dari setengah abad yang lalu.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan di dalam Mata Kuliah “Pendekatan Gender dalam Sejarah” yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Sejarah, Universitas Gadjah Mada Tahun 2022/2023. Sebelum diterbitkan, artikel ini telah mengalami pengubahan seperlunya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Dr. Mutiah Amini, M.Hum. dan Dr. Yulianti, M.A. yang telah memberikan bimbingan, ilmu, serta kritik dan saran selama proses penelitian hingga penulisan berlangsung.

DAFTAR SUMBER

- Amini, Mutiah. 2021. *Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia 1928-1998*. Yogyakarta: UGM Press.
- Andaya, Barbara Watson. 2021. *Kuasa Rahim: Reposisi Perempuan Asia Tenggara Periode Modern Awal*

- 1400-1800. Depok: Komunitas Bambu.
- Anderson, Benedict R.O.G. 2006. *Java In a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. Jakarta: Equinox Publishing Indonesia.
- Anonim. 1947a. "1 Mei-viering in Batavia." *Het Dagblad: Uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia*, April, 23.
- Anonim. 1947b. Tanpa Judul. *Merdeka*, Mei, 2.
- Anonim. 1952. "Perundangan Perburuhan". *SIKAP*. Vol. 5. No. 7-8. Februari 29, 3 dan 11.
- Anonim. 1953a. "De Dreigende Staking in Oost-Sumatra." *Indische Courant voor Nederland*, Januari, 17.
- Anonim. 1953b. "DPP Sarbupri jang Baru Tersusun." *Kedaulatan Rakjat*. Januari, 7.
- Anonim. 1953c. "Delegasi ke Kongres Wanita Kembali." *Kedaulatan Rakjat*, Juni, 22.
- Anonim. 1953d. "Delegatie naar Kopenhagen." *Indische Courant voor Nederland*, Mei, 13.
- Anonim. 1955a. "136 Buruh di Depan Pengadilan." *Harian Rakjat*. Februari, 24.
- Anonim. 1955b. "Tjurahkan Perhatian Kepada Buruh Wanita." *Harian Rakjat*, Maret 16.
- Anonim. 1955c. Tanpa Judul. *Harian Rakjat*, Mei, 22.
- Anonim. 1955d. Tanpa Judul. *Harian Rakjat*, September, 26.
- Anonim. 1956. Tanpa Judul. *Kedaulatan Rakjat*, Mei, 23.
- Anonim. 1957a. "Nj. Setiati (PKI): Hak Kaum Buruh & Wanita Harus Didjamin dalam U.U.D." *Harian Rakjat*, Mei, 24.
- Anonim. 1957b. "Constituante Over Onderwerpen voor de Nieuwe Grondwet." *Java-bode: Nieuws, Handels- en Advertentieblad voor Nederlandsch-Indie*, Mei, 24.
- Anonim. 1960. "Tangan-Tangan Tjekatan jang Kurang Dihargai." *Api Kartini* Vol. 2. No. 5. Mei, 3.
- Becker, Anna. 2017. "Gender in the History of Modern Political Taught." *The Historical Journal* 60(4):843-863.
- Bock, Gisela. 1989. "Women's History and Gender History: Aspects of an International Debate." *Gender and History* 1(1):7-30.
- Hearman, Vannessa. 2016. "Indonesian Trade Unionists, the World Federation of Trade Unions and Cold War Internationalism, 1947-65." *Labour History* 111:27-44.
- Hera, F.X. Domini B.B. 2015. "Menghadirkan Ruang bagi Buruh Perempuan dalam Studi Sejarah Indonesia." *Jurnal Sejarah dan Budaya* 9(1):19-26.

- Hill, David T. 2020. "Cold War Polarization, Delegated Party Authority, and Diminishing Exilic Options: The Dilemma of Indonesian Political Exiles in China After 1965." *Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde*. 176:338-372.
- Knight, G.R. 2000. "Kuli-kuli Parit, Wanita Penyang, dan Snijvolk: Pekerja-pekerja Industri Gula Jawa Utara Awal Abad Ke-20." Hlm. 99-128 dalam *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*, disunting oleh J. Thomas Lindblad. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Kumpul. 1956a. "Sekedar Bingkisan: Oleh-oleh dari Luar Negeri I." *Mimbar Penerangan* 7(1):497-498.
- _____. 1956b. "Sekedar Bingkisan Oleh-Oleh dari Luar Negeri II." *Mimbar Penerangan* 7(9):566-570.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Leirissa, R.Z. 1984. "Segi-segi Praktis Penulisan Biografi Tokoh", Hlm. 94-101 dalam *Pemikiran Biografi dan Kesejarahan Jilid III*, disunting oleh R.Z. Leirissa dan Soenjata Kartadarmadja. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Lestariningsih, Amurwani Dwi. 2011. *GERWANI: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan*. Jakarta: Kompas.
- Locher-Scholten, Elsbeth. 2000. *Women and the Colonial State: Essays on Gender and Modernity in the Netherlands Indies 1900-1942*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Lukitaningsih dan Soegianto Padmo. 2014. "Buruh Perempuan di Perkebunan Karet Sumatra Timur 1900-1940". *Humanika*. 17(1):35-49.
- Martyn, Elizabeth. 2001. "Gender and Nation in A New Democracy: Indonesian Women's Organisations in the 1950s". *Disertasi*. School of Political and Social Inquiry, Monash University.
- Mortimer, Rex. 2006. *Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965*. Singapura: Equinox Publishing Asia Ltd.
- Nadia, Ita Fatia. 2006. "Kemerdekaan: Identitas Pribadi dan Kebangsaan." Hlm. 4-8 dalam *Memoar Perempuan Revolusioner*, disunting oleh Fransisca Fanggidaej. Yogyakarta: Galangpress.
- Nurliana, Nana dkk. 1986. *Peranan Wanita Indonesia di Masa Perang Kemerdekaan 1945-1950*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rahayu, Ruth Indiah. 2017. "Konstruksi Historiografi Feminisme di Indonesia dari Tutar Perempuan." *Workshop Historiografi Indonesia: di antara Historiografi Nasional dan*

- Alternatif*, Juli 2-4. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Australia Research Council..
- Saptari, Ratna. 2013. "Bangsa dan Politik Perburuhan dalam Proses Dekolonisasi." Hlm. 1-54 dalam *Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa*, disunting oleh Erwiza Erman dan Ratna Saptari. Jakarta: Penerbit Obor dan KITLV-Jakarta.
- Stuers, Cora Vreede-de. 2017. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Depok: Komunitas Bambu.
- Surasto, Setiati. 1957. "Memperluas Keanggotaan Partai di Kalangan Wanita." *Kehidupan Partai*, Februari, 19-21.
- _____. 1960. "Buruh Wanita Berjuang Untuk Hak Sama dan Untuk Sandangpangan." *Api Kartini* Vol. 2. No. 5. Mei, 4-5.
- Suryomenggolo, Jafar. 2015. *Politik Perburuhan Era Demokrasi Liberal 1950an*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Trimurti, S.K. 1950. "Organisasi Buruh-Wanita." *Pesat*. Vol. 6. No. 6. Mei 3, 73.
- _____. 2020. *Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia dengan Kemerdekaan Nasional*. Yogyakarta: Bakung Putih.